



Pola Perilaku Konsumsi Keluarga Penerima Manfaat Pkh (Program Keluarga Harapan) Di Kelurahan Pejagan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan

Wahyu Nur Imama¹ ; Herry Yulistiyono²
Universitas Trunojoyo Madura

herryulistiyono@gmail.com

<https://doi.org/10.29407/nusamba.v5i2.14899>

Informasi Artikel

Tanggal masuk:

17 Juli 2020

Tanggal revisi :

22 September 2020

Tanggal diterima:

6 Oktober 2020

Abstract

The purpose of this study was to determine how consumption patterns of behavior before and after the family received PKH assistance in Pejagan Village, Bangkalan District, Bangkalan District. The research method used is descriptive qualitative, with a focus of research on the consumption patterns of PKH beneficiary families. Data collection methods are done by interview, observation, and documentation. Data analysis techniques were performed using data reduction, presentation, and drawing conclusions. To test the validity of the data using source triangulation. The results showed that the implementation of the Family Hope Program in Pejagan Sub-district, Bangkalan District, Bangkalan District had gone well because the distribution process to poor households was in accordance with procedures. The main objectives of the Harapan Families Program are to break the poverty chain, improve the quality of human resources, and change behavior that is less supportive in improving welfare. In this study welfare measurement is seen from household consumption patterns. It is known that the acceptance of the Family Hope Program assistance received by RTSM is sufficient to reduce the burden of household expenses on children's education costs. While in the household there are various kinds of needs both food and non-food.

Keyword: Consumption patterns, Consumption Factors, PKH.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pola perilaku konsumsi sebelum dan sesudah keluarga menerima bantuan PKH di Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan fokus penelitian pada pola konsumsi keluarga penerima manfaat PKH. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Untuk menguji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan sudah berjalan dengan baik karena proses penyalurannya kepada rumah tangga miskin sudah sesuai dengan prosedur. Tujuan utama Program Keluarga Harapan yaitu untuk

memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung dalam peningkatan kesejahteraan. Pada penelitian ini pengukuran kesejahteraan dilihat dari pola konsumsi rumah tangga. Diketahui bahwa adanya penerimaan bantuan Program Keluarga Harapan yang diterima RTSM cukup untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga pada biaya pendidikan anak. Sementara dalam rumah tangga terdapat berbagai macam kebutuhan baik pangan maupun non pangan.

Kata Kunci : Pola Konsumsi, Faktor konsumsi, PKH.

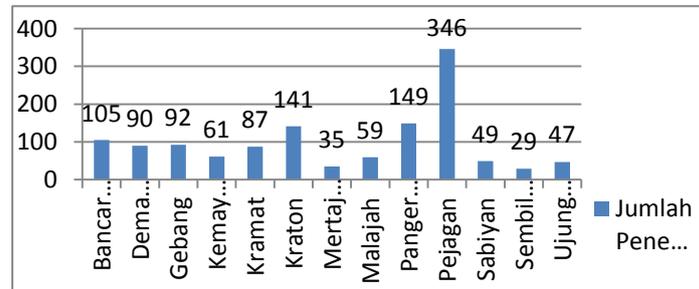
1. Pendahuluan

Indonesia menempati urutan keempat pada daftar jumlah penduduk terbanyak di dunia, dengan jumlahnya yang mencapai 261.809,9 jiwa. Jumlah penduduk Indonesia yang tinggi membuat rentan terhadap masalah ekonomi yang berdampak pada kemiskinan. Secara khusus, kemiskinan diukur dengan membandingkan pendapatan atau konsumsi setiap individu dengan standart yang ditetapkan, mereka dianggap miskin apabila pendapatan atau konsumsi mereka berada dibawah standart tersebut menurut World Bank (dalam Haughton, 2012). Begitu pula menurut Badan Pusat Statistik (2010) penduduk miskin adalah penduduk yang berada dibawah suatu batas tertentu, yang disebut garis kemiskinan.

Diketahui bahwa Garis Kemiskinan Kabupaten Bangkalan sebesar 349.073 rupiah/ bulan, angka tersebut termasuk angka tertinggi di Provinsi Jawa Timur. Padahal Kabupaten Bangkalan merupakan Kabupaten dengan Angka Kemiskinan tertinggi kedua sebesar 21,32 persen di Provinsi Jawa Timur setelah Kabupaten Sampang sebesar 23,56 persen (BPS, 2017). Tingginya kemiskinan pada Kabupaten Bangkalan salah satunya disebabkan oleh Tingkat Pengangguran Terbuka yang masih tinggi yaitu sebesar 5.25 persen yang mencapai angka 494.269 jiwa. Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan jumlah pengangguran pada usia produktif pada wilayah tersebut (BPS, 2018). Seharusnya Kabupaten Bangkalan sebagai kabupaten penyangga Kota Surabaya yang memiliki potensi besar dengan adanya jembatan suramadu, yang secara geografis Kabupaten Bangkalan berada diposisi pintu gerbang madura dapat menjadi barometer (alat ukur) pembangunan di pulau Madura.

Adanya Program Keluarga Harapan atau yang disingkat PKH merupakan program bantuan kepada rumah tangga miskin dengan mewajibkan setiap anggota keluarganya untuk melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Target dari program tersebut bukan saja keluarga miskin yang mempunyai komponen kesehatan, pendidikan, namun juga keluarga dengan komponen disabilitas dan lanjut usia. Tujuan utama dari PKH ini dimaksudkan untuk memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung dalam peningkatan kesejahteraan (Permensos, 2017)

Grafik 1.1 Jumlah Penerima PKH di Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan (Januari-Maret, 2019)



Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan 2019 (data diolah)

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Pejagan, karena pada kelurahan tersebut jumlah keluarga yang menerima bantuan PKH lebih banyak yaitu sebesar 346 keluarga. Padahal Kecamatan Bangkalan merupakan wilayah perkotaan di Kabupaten Bangkalan. Adanya penambahan keluarga penerima manfaat PKH (Program Keluarga Harapan), berarti masih terdapat rumah tangga miskin pada Kelurahan Pejagan. Menurut BPS, dalam menghitung kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan tersebut, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan (makanan dan bukan makanan).

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pola perilaku konsumsi keluarga penerima manfaat PKH (Program Keluarga Harapan) di Kelurahan Pejagan. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui untuk mengetahui pola konsumsi sebelum dan sesudah keluarga menerima bantuan PKH pada Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan.

2. Metode

Fokus penelitian ini difokuskan pada bagaimana pola perilaku konsumsi sebelum dan sesudah keluarga menerima bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) di Kelurahan Pejagan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder dengan informan sebagai data primer, sedangkan data sekunder diperoleh dari data yang tersedia oleh BPS, dan terkait penelitian-penelitian dahulu yang relevan. Penelitian ini diawali dengan observasi, kemudian data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan beberapa informan yaitu ibu rumah tangga yang menerima PKH (maksimal 3 tahun) untuk mengetahui pola konsumsi pada awal menerima bantuan PKH dan ibu rumah tangga yang menerima bantuan PKH (minimal 10 tahun) untuk mengetahui pola konsumsi setelah lamanya menerima bantuan PKH. Jumlah informan yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 7 informan yang terdiri dari 6 ibu rumah tangga yang menerima bantuan PKH sebagai informan kunci, dan 1 informan pendukung yaitu Pendamping PKH untuk mengetahui bagaimana penyaluran bantuan PKH kepada penerima bantuan tersebut. Kemudian data yang terkumpul akan dianalisis secara induktif dan dilakukan uji keabsahan data melalui triangulasi sumber antar informan, yakni untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang diperoleh dari sumber-sumber yang terlibat dalam penelitian ini.

3. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan PKH di Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program asistensi sosial kepada rumah tangga yang memenuhi klarifikasi tertentu dengan memberlakukan persyaratan dalam rangka untuk mengubah perilaku miskin. Program Keluarga Harapan merupakan suatu program penanggulangan kemiskinan, program bantuan PKH ini merupakan bagian dari penanggulangan kemiskinan lainnya. Program Keluarga Harapan berada dibawah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) baik di pusat maupun di daerah. Pelaksana PKH di tingkat kecamatan, dibutuhkannya peran pendamping untuk membantu masyarakat miskin untuk mendapatkan hak serta mendampingi dalam melaksanakan kewajiban sebagai peserta PKH (Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial). Bagi penerima program bantuan PKH mewajibkan memiliki persyaratan yang sudah ditentukan dalam peraturan menteri sosial nomor 10 tahun 2018. Menurut Bapak Fathur, selaku ketua pendamping PKH menyatakan bahwa:

“Memang PKH ini yang menerima tidak sembarang orang, yang memiliki kategori ibu hamil, punya anak balita, anak yang masih sekolah SD, SMP, SMA, penyandang disabilitas yang benar-benar tidak bisa apa-apa, lansia umur 70 keatas, dengan memiliki kategori tersebut bisa menerima bantuan PKH” (Hasil wawancara, Bapak Fathur, Ketua Pendamping PKH, 01 Juni 2020).

Maka dari itu sebagai pendamping PKH memastikan agar bantuan PKH ini tetap tepat sasaran. Menurut hasil wawancara Bapak Fathur, sebagai pendamping PKH juga terus melakukan pemuktahiran data untuk memastikan pemanfaatan bantuan yang diperoleh dari PKH, terutama pada tahun ajaran baru selalu mendapat perhatian khusus karena terjadi perubahan yang drastis. Dengan adanya pendampingan di setiap desa, juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman mengenai pentingnya pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan keuangan bagi keluarga penerima manfaat PKH yang dilakukan dengan mengadakan pertemuan-pertemuan yang disebut dengan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau *Family Development Session* (FDS).

Pada penelitian Elly Kutjorowati (2018) menunjukkan bahwa pada hasil hipotesanya terdapat pengaruh pemberdayaan melalui FDS terhadap kesejahteraan KPM dibidang pendidikan, ekonomi, dan perlindungan anak. Sementara penelitian lainnya menurut Sunit Cahyono dan Siti (2018) menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan berkontribusi kepada peningkatan kesejahteraan keluarga, khususnya mereduksi kekurangan kualitas dan kuantitas pangan, kesehatan dan pendidikan sehingga KPM cenderung lebih sejahtera.

Faktor Yang Mempengaruhi Konsumsi

1) Pendapatan

Pendapatan merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap pola konsumsi, semakin besar pendapatan maka akan semakin besar pula pengeluaran untuk konsumsi. Karena ketika pendapatan meningkat maka kemampuan rumah tangga untuk membeli aneka kebutuhan konsumsi

semakin besar (Raharja & Manurung, 2008). Sumber pendapatan yang dimiliki oleh keluarga penerima PKH adalah hasil jerih payah dari pekerjaan yang ditekuninya, yang tentunya berasal dari berbagai sumber yang berbeda antar rumah tangga. Pendapatan tersebut tergantung pada kesempatan bekerja dan berusaha dari masing-masing angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Jenis pekerjaan yang dimiliki oleh kepala keluarga penerima PKH di Kelurahan Pejagan rata-rata sebagai buruh atau berjualan, jenis pekerjaan tersebut tergolong tidak tetap sehingga pada saat kepala keluarga tidak bekerja, keluarga tidak memiliki penghasilan. Menurut ibu Atmani selaku ibu rumah tangga penerima PKH (maksimal 3 tahun) menyatakan bahwa:

“Kerja serabutan kalau ada orang yang ngajak kerja jadi tukang (kuli) ya ikut”(Hasil wawancara, Atmani, ibu rumah tangga penerima PKH (maksimal 3 tahun), 18 maret 2020)

Ibu Atmani juga menyatakan bahwa :

“Nunggu kalau ada kerjaan”(Hasil wawancara, Atmani, ibu rumah tangga penerima PKH (maksimal 3 tahun), 18 maret 2020)

Sehingga untuk menambah pendapatan dalam rumah tangganya, sebagian ibu rumah tangga penerima PKH melakukan pekerjaan dengan berjualan seperti yang dilakukan bu Atmani sebagai berikut:

“Iya berjualan belanja-belanja keliling. Kalau hasilnya tidak tentu paling sedikit dapat tiga puluh ribu, kadang kembali ke modalnya lima ratus ribu. Kadang juga kurang dari modalnya dapat empat ratus ribu, nanti ikan yang masih ada digoreng buat makan sekeluarga” (Hasil wawancara, Atmani, ibu rumah tangga penerima PKH (maksimal 3 tahun) 18 Maret 2018).

Perolehan pendapatan yang diterima oleh kepala keluarga masih tergolong rendah dan masih jauh dari standart upah minimum regional Kabupaten Bangkalan. Kepala keluarga yang mayoritas memiliki pekerjaan buruh non tani tentu saja pendapatan yang diterima sangat tergantung pada hasil pekerjaan yang sudah terselesaikan, saat belum selesai maka tidak akan mendapatkan upah. Sedangkan hasil yang didapat oleh istri juga tidak menentu, saat dagangannya laku maka akan mendapatkan keuntungan sebagai upah atau gaji, namun saat dagangannya tidak begitu laku hanya akan kembali pada modal saja.

2) Jumlah Tanggungan Keluarga

Jumlah tanggungan keluarga adalah jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan dari rumah tangga tersebut yang tinggal satu rumah tetapi belum bekerja. Apabila dilihat dari tingkat jumlah anggota keluarga, semakin sedikit anggota keluarga berarti semakin sedikit pula kebutuhan yang harus dipenuhi keluarga, begitu pula sebaliknya. Sehingga dalam keluarga yang jumlah anggotanya banyak, akan diikuti oleh banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi (Ananda, 2015).

Kebutuhan yang diperlukan dalam rumah tangga tidak hanya berupa kebutuhan pangan, namun juga terdapat pengeluaran non pangan seperti biaya pendidikan anak karena pendidikan merupakan hal penting bagi manusia dengan berpendidikan akan tercipta sumber daya manusia yang berkualitas (Khairunnisa, 2015). Menurut ibu Subaidah selaku ibu rumah tangga penerima PKH (minimal 10 tahun), bahwa jumlah anggota keluarganya berjumlah 6 orang yang terdiri dari suami, istri dan 4 anak. Dari keempat anaknya hanya tiga anak yang bersekolah, anak yang pertama sedang kuliah sambil mondok dan anak yang kedua bersekolah SMP sambil mondok juga, serta anak ketiga bersekolah SD. Dengan semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh maka semakin banyak biaya yang dikeluarkan untuk membiayai pendidikannya.

“Setiap semester bayar satu juta delapan ratus, kalau yang sekolah SMP tidak ada SPP” (Hasil wawancara, Subaidah, ibu rumah tangga penerima PKH (minimal 10 tahun) 07 Maret 2020).

Berbeda halnya dengan rumah tangga yang memiliki jumlah tanggungan keluarga yang lebih sedikit. Dengan jumlah tanggungan keluarga yang lebih sedikit maka biaya yang dikeluarkan untuk biaya pendidikan anak lebih ringan. Menurut ibu Atmani selaku ibu rumah tangga penerima PKH (maksimal 3 tahun) mengungkapkan bahwa anggota keluarga berjumlah tiga orang yang terdiri dari suami, istri, dan satu anak yang masih bersekolah SMA.

“Dua puluh ribu sehari, soalnya pulang sore, makan pagi dan siang di sekolahnya” (Hasil wawancara, Atmani, ibu rumah tangga penerima PKH (maksimal 3 tahun).

Diketahui bahwa pada jumlah tanggungan keluarga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pola konsumsi rumah tangga. Banyaknya jumlah tanggungan keluarga, maka pola konsumsinya semakin bervariasi. Karena kebutuhan setiap anggota rumah tangga tergantung pada struktur umur mereka, artinya setiap anggota rumah tangga memerlukan porsi makanan yang sesuai dengan tingkat kebutuhannya yang ditentukan berdasarkan umur dan keadaan fisik masing-masing, Sediaoetama (dalam Ananda, 2015).

3) Harga Barang Yang Bersangkutan

Dalam pemenuhan kebutuhan pada rumah tangga penerima PKH tidak terlepas dari aktivitas ekonomi salah satunya mengkonsumsi barang dan jasa. Rumah tangga membutuhkan berbagai komoditi baik makanan maupun non makanan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Namun karena pendapatan rendah, rumah tangga penerima PKH lebih memilih berbelanja di Pasar untuk membeli bahan-bahan makanan. Hal tersebut karena harga bahan makanan yang lebih murah. Menurut ibu Sulaipah selaku ibu rumah tangga penerima PKH (minimal 10 tahun) menyatakan bahwa:

“Belanja dibelanja-belanja keliling atau di pasar, karena bisa ditawar” (Hasil wawancara, Sulaipah, ibu rumah tangga penerima PKH (minimal 10 tahun) 07 Maret 2020)

Pernyataan diatas menjelaskan bawa, dalam sehari-hari bu Sulaipah memilih untuk berbelanja bahan makanan di pasar ataupun di tukang belanja keliling, dengan alasan karena bahan makanan yang dibeli bisa ditawar. Pembelian bahan makanan yang dikonsumsi rumah tangga penerima PKH merupakan bahan makanan yang juga menjadi sumber protein seperti tahu, tempe, telur, dan ikan laut. Menurut ibu Sulaipah selaku ibu rumah tangga penerima PKH (minimal 10 tahun) juga menyatakan bahwa:

“Belanja ikan tongkol, tahu, tempe, kangkung dua ribu, beli daging ayam atau sapi jarang”
(Hasil wawancara, Sulaipah, ibu rumah tangga penerima PKH (minimal 10 tahun), 07 Maret 2020)

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa lauk yang sering dikonsumsi oleh keluarga ibu Sulaipah adalah jenis ikan laut, sedangkan dalam mengkonsumsi daging ayam atau daging sapi bu Sulaipah hanya membeli sesekali. Pada jenis konsumsi makanan rumah tangga penerima PKH lebih memilih untuk mengkonsumsi ikan laut seperti jenis ikan tongkol, pindang sebagai lauk makanan sehari hari, karena harganya yang murah. Dengan pendapatan rumah tangga yang termasuk menengah kebawah menyebabkan rendahnya daya beli rumah tangga terhadap jenis makanan daging ayam maupun daging sapi yang merupakan makanan kategori mewah. Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Maya Kusuma (2018) mengenai “Analisis Konsumsi Daging Sapi dan Daging Ayam Pada Rumah Tangga Penerima Program Keluarga Harapan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran untuk daging sapi dan daging ayam pada rumah tangga non PKH lebih tinggi daripada rumah tangga penerima PKH.

Peran Program Bantuan PKH Terhadap Pengeluaran Rumah Tangga Penerima PKH (minimal 10 tahun dan maksimal 3 tahun)

Adanya Program Keluarga Harapan dianggap sebagai bantuan penyelamat bagi masyarakat miskin. Hal tersebut tidak terlepas dari keprihatinan masyarakat dalam berbagai aspek khususnya pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Dari aspek prekonomian, juga masih banyak masyarakat Kabupaten Bangkalan berkategori miskin. Penanganan kemiskinan yang dilakukan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah harus ada komando (tim koordinasi) yang jelas. Hal tersebut sangatlah penting agar tidak terjadi gejala antara masyarakat penerima bantuan dan agar masyarakat tidak hanya sekedar bergantung pada bantuan tersebut. Namun berdaya sesuai visi Kabupaten Bangkalan dalam menjalankan program dari Kementerian Sosial.

Dalam penyaluran bantuan PKH ini perlu adanya proteksi dan inovasi terhadap program yang dilakukan Pemerintah daerah untuk mendukung PKH. Tujuannya adalah dengan adanya program bantuan PKH yang dikelola dengan baik diharapkan mampu mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Bangkalan. sedikit banyaknya program bantuan PKH ini cukup berperan dalam memenuhi kebutuhan pada keluarga RTSM terutama untuk biaya pendidikan. Keberadaan program bantuan PKH ini juga cukup memberikan keringanan kepada rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga yang relatif cukup banyak.

Keberhasilan yang dapat dilihat dari pelaksanaan program bantuan PKH khususnya di Kelurahan Pejagan adalah dengan meningkatkan partisipasi pada bidang pendidikan. Hal tersebut

sesuai dengan tujuan dalam jangka pendek PKH yaitu pengurangan terhadap beban pengeluaran RTSM melalui aspek pendidikan dan kesehatan. Menurut BPS, angka partisipasi pada bidang pendidikan termasuk investasi yang penting, karena investasi pada bidang ini merupakan pembangunan dibidang lainnya, seperti pada bidang kesehatan dan ekonomi yang nantinya akan tercipta sumber daya manusia yang berkualitas sehingga dapat keluar dari terperangkapnya dalam lingkaran kemiskinan. Dalam penelitian Dedy Utomo dan Hakim, menunjukkan bahwa pencapaian target pelaksanaan PKH di Kecamatan Purwosari terbukti dengan terbantunya masyarakat tidak mampu khususnya RTSM dalam memenuhi kebutuhan hidup berkaitan dengan pendidikan anaknya dan kesehatan ibu hamil serta balita.

Sementara pada penelitian lainnya yang dilakukan oleh Munari kustanto, (2019) menunjukkan bahwa terdapat dua kategori pemahaman tentang pendidikan, oleh KPM PKH di Kabupaten Sidoarjo, yaitu dipahami sebagai akses ekonomi, dan dipahami sebagai jalan mobilitas vertikal. Pemahaman pendidikan sebagai akses terhadap ekonomi dengan memperoleh pekerjaan. Melalui pendidikan dan pekerjaan maka anak KPM PKH diharapkan dapat melakukan *mobilitas vertical*, sehingga dapat ke luar dari kemiskinan.

Kontribusi Program Bantuan PKH Dalam Meningkatkan Pola Perilaku Konsumsi KPM PKH

Kesejahteraan merupakan barometer penting dalam mengetahui kualitas hidup masyarakat. Kesejahteraan juga merupakan sebuah kepuasan yang diperoleh oleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterimanya (Ilmawan, 2013). Dalam menetapkan kesejahteraan keluarga bukan hanya menyangkut permasalahan pada bidang tertentu saja melainkan menyangkut berbagai bidang dalam kehidupan yang kompleks, dan dengan sulitnya mencari data yang akurat mengenai keluarga sejahtera maka pendekatan yang sering digunakan adalah melalui pendekatan pengeluaran rumah tangga.

Pada hasil penelitian ini diketahui bahwa tidak terdapat perubahan terhadap pemenuhan kebutuhan rumah tangga penerima PKH (maksimal 3 tahun dan minimal 10 tahun) pada pengeluaran pangan. Berdasarkan hasil wawancara bahwa perubahan pada pola konsumsi ditentukan dari pendapatan yang diperoleh dalam rumah tangganya, termasuk perolehan bantuan dari Program Keluarga Harapan. Pengalokasian pendapatan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan, namun ketika kebutuhan dalam rumah tangganya tercukupi dan perolehan pendapatan dalam rumah tangga lebih tinggi dari pendapatan yang diperoleh biasanya, rumah tangga penerima PKH minimal 10 tahun akan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan lainnya seperti membeli barang atau jasa yang dibutuhkan dalam rumah tangga tersebut (seperti pernah menggunakan uang bantuan untuk membeli sepeda engkal), ataupun menggunakan uang tersebut untuk tambahan membangun rumah sedikit demi sedikit, dan dalam rumah tangga penerima PKH maksimal 3 tahun tidak terdapat perubahan pada non pangan. Sementara untuk konsumsi pangan, rumah tangga penerima PKH (maksimal 3 tahun dan minimal 10 tahun) tetap memilih untuk mengkonsumsi bahan makanan yang lebih murah dan terjangkau seperti sebelum rumah tangga menerima bantuan PKH, yaitu lebih sering untuk mengkonsumsi tempe, tahu, dan ikan laut.

Dan untuk perubahan perilaku konsumsi, pada penelitian ini dibagi menjadi 7 point perilaku yaitu; (1) Perilaku konsumsi dalam membeli pakaian pada rumah tangga penerima PKH (maksimal 3 tahun dan minimal 10 tahun) tidak terjadi perubahan saat sebelum dan sesudah menerima bantuan PKH, hal tersebut karena perilaku konsumsi dalam membeli pakaian saat hari raya idul fitri ditentukan oleh faktor kebiasaan masyarakat. (2) Perilaku konsumsi dalam kepemilikan kendaraan, pada rumah tangga penerima PKH (maksimal 3 tahun dan minimal 10 tahun) tidak terjadi perubahan saat sebelum dan sesudah menerima bantuan PKH. (3) Perilaku konsumsi dalam kepemilikan barang elektronik juga tidak berpengaruh dengan adanya bantuan PKH pada rumah tangga penerima (maksimal 3 tahun dan minimal 10 tahun). (4) Perilaku konsumsi dalam kepemilikan alat komunikasi pada rumah tangga penerima bantuan PKH (maksimal 3 tahun dan minimal 10 tahun) tidak terdapat perubahan juga, termasuk pembelian pulsa pada saat sebelum dan sesudah menerima bantuan. (5) Perilaku konsumsi dalam mengikuti arisan, keikutsertaan rumah tangga dalam mengikuti arisan cenderung diikuti oleh KPM yang sudah lama menerima PKH (rumah tangga penerima PKH minimal 10 tahun), menurut paparan informan dengan alasan sebagai ganti menabung. Sementara rumah tangga penerima PKH maksimal 3 tahun, dari hasil penelitian bahwa tidak ada yang mengikuti arisan. (6) Perilaku konsumsi dalam pergi berlibur, baik pada rumah tangga penerima PKH (maksimal 3 tahun dan minimal 10 tahun) tidak pernah berpergian untuk berlibur saat sebelum dan sesudah menerima bantuan PKH. (7) Perilaku konsumsi dalam mengkonsumsi rokok juga tidak terjadi perubahan signifikan pada sebelum dan sesudah rumah tangga penerima bantuan PKH. Sebelum menerima bantuan PKH, rata-rata kepala keluarga penerima manfaat PKH sudah sering dalam mengkonsumsi rokok.

Pada hasil penelitian yang dilakukan Paradipta Prastiwi dan Sugeng (2018) menunjukkan bahwa dana bantuan PKH dimanfaatkan untuk menunjang gaya hidup mereka untuk membeli barang mewah, dikarenakan hipperealitas dan simulacra yang didapat dari pengaruh iklan di televisi, serta tidak ingin kalah saing dengan tetangga mereka yang mayoritas bekerja sebagai TKI.

Sedangkan pada penelitian lainnya yang dilakukan oleh Megawati Simanjuntak (2010) menunjukkan bahwa penerimaan total keluarga meningkat secara signifikan 1,3 kali lipat pada saat mendapat PKH. Adanya penerimaan bantuan PKH tidak merubah pada kondisi rumah tangga miskin, namun terdapat peningkatan pada kepemilikan alat elektronik. Kepala keluarga mempunyai kontribusi terbesar baik praPKH maupun saat PKH terhadap penerimaan total keluarga serta secara statistik adalah berbeda nyata. Pengeluaran rata-rata per bulan keluarga untuk pangan 70,1% dan nonpangan 29,9%. Terjadi peningkatan yang signifikan menjadi hampir dua kali lipat pada keluarga yang berhutang saat mendapat dana PKH. Kemampuan membayar hutang dengan aset yang dimiliki, semakin meningkat dengan diperolehnya dana PKH, dengan kata lain perolehan dana bantuan PKH sebagian digunakan untuk membayar hutang.

Pada penelitian ini menurut paparan informan diketahui bahwa rumah tangga penerima PKH maksimal 3 tahun sebelum menerima bantuan PKH rata-rata rumah tangga merasa kesulitan terhadap biaya pendidikan anak dan setelah memperoleh bantuan ini, rumah tangga merasa adanya keringanan terhadap biaya pendidikan anak meskipun bantuan yang diperoleh tidak cukup jika untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Begitu pula menurut paparan informan rumah tangga penerima PKH minimal 10 tahun bahwa rumah tangga juga merasakan keringanan terhadap biaya pendidikan anak selama

menerima program bantuan PKH. Artinya adanya Program Keluarga Harapan bagi RTSM yang menerima sangat berpengaruh pada pengurangan beban terhadap biaya pendidikan, hal tersebut sesuai dengan tujuan jangka pendek dari Program Keluarga Harapan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dwi Fitrianingrum dan Totok Suyanto, (2014) menunjukkan bahwa penggunaan dana PKH oleh peserta PKH pada bidang pendidikan di desa Talok dibedakan menjadi dua yaitu penggunaan dana PKH secara langsung untuk kebutuhan sekolah dan penggunaan tidak langsung untuk kebutuhan sekolah. Pada pemenuhan kebutuhan sekolah secara tidak langsung seperti membeli beras, membeli obat, membeli baju, kecukupan pemenuhan dalam kehidupan sehari-hari tidak seluruhnya untuk berfoya-foya menikmati bantuan PKH melainkan hal ini digunakan sebagai penunjang kebutuhan langsung untuk sekolah. Prioritas utama tetap untuk pendidikan tetapi dalam hal pemenuhan tersebut ada pula kebutuhan yang menunjang dalam memaksimalkan hasil yang ingin dicapai dalam hal pendidikan.

Berdasarkan pembahasan penelitian ini bahwa pola konsumsi yang terjadi dalam rumah tangga penerima PKH di Kelurahan Pejagan, baik pada rumah tangga penerima PKH maksimal 3 tahun maupun rumah tangga penerima PKH minimal 10 tahun sesuai dengan teori konsumsi yang dikemukakan menurut James Dusenberry yaitu teori konsumsi dengan hipotesis pendapatan relatif. Dalam teori ini terapat dua asumsi (faktor) yang mempengaruhi konsumsi, pada asumsi yang pertama bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga dipengaruhi oleh pengeluaran yang dilakukan oleh orang sekitarnya (tetangganya). Dan pada asumsinya yang kedua bahwa pengeluaran konsumsi adalah irreversible, Artinya pola pengeluaran rumah tangga saat penghasilan naik berbeda dengan pola pengeluaran rumah tangga pada saat penghasilan mengalami penurunan. Dengan kata lain pengeluaran konsumsi suatu masyarakat ditentukan oleh tingginya pendapatan yang pernah dicapainya. Misalnya, apabila pendapatan rumah tangga mengalami kenaikan maka secara otomatis konsumsi juga mengalami kenaikan dengan proporsi tertentu, dan apabila pendapatan mengalami penurunan maka juga akan diikuti oleh penurunan konsumsinya.

Pola pengeluaran rumah tangga penerima bantuan PKH di Kelurahan Pejagan naik ketika rumah tangga mendapatkan bantuan (dana) dari PKH. Terutama pada pola perilaku konsumsi rumah tangga penerima PKH minimal 10 tahun dalam pengeluaran non pangan. Sementara saat rumah tangga tidak mendapatkan bantuan tersebut, maka pola pengeluarannya akan kembali seperti semula yaitu mengalami penurunan karena menyesuaikan pemasukan (pendapatan) yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangganya. Dalam hal ini, rumah tangga penerima PKH berusaha agar pendapatan yang diperoleh tetap mencukupi kebutuhan pangan maupun non pangan meskipun pada saat perolehan pendapatan yang paling rendah dari pendapatan yang diperoleh dari biasanya.

4. Kesimpulan

Kesimpulan yang bisa diperoleh dari hasil kajian ini diketahui bahwa Pelaksanaan program bantuan PH (program Keluarga harapan) di Kelurahan Pejagan Kecamatan Bangkalan kabupaten bangkalan sudah baik karena proses penyalurannya kepada rumah tangga miskin sudah sesuai dengan prosedur. Dengan adanya pendampingan di setiap desa/ kelurahan untuk memastikan dana bantuan

yang diperoleh dari bantuan PKH digunakan semestinya. Sehingga visi dari Program Keluarga Harapan benar-benar dapat mengurangi beban pengeluaran RTSM melalui aspek pendidikan.

Pada perubahan pada pola konsumsi ditentukan dari pendapatan yang diperoleh dalam rumah tangganya, termasuk perolehan bantuan dari Program Keluarga Harapan. Pada saat pendapatan rumah tangga penerima PKH (minimal 10 tahun) lebih tinggi dari pendapatan yang diperoleh dari biasanya, rumah tangga akan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan lainnya seperti membeli barang atau jasa yang dibutuhkan dalam rumah tangga tersebut (seperti digunakan untuk membeli sepeda engkal, atau sebagai tambahan dalam membangun rumah), dengan kata lain konsumsi non pangan pada rumah tangga penerima PKH minimal 10 tahun sedikit berubah dengan adanya perolehan bantuan PKH. Dan dalam rumah tangga penerima PKH maksimal 3 tahun tidak terdapat perubahan pada non pangan. Sementara untuk konsumsi pangan rumah tangga penerima PKH (maksimal 3 tahun dan minimal 10 tahun) tetap memilih untuk mengkonsumsi bahan makanan yang lebih murah dan terjangkau seperti sebelum rumah tangga menerima bantuan PKH. Sementara pada perilaku konsumsi rumah tangga penerima bantuan PKH cenderung mengalami perubahan pada rumah tangga penerima PKH minimal 10 tahun dalam keikutsertaan mengikuti arisan. Sedangkan pada perilaku konsumsi lainnya dalam membeli pakaian, kepemilikan kendaraan, kepemilikan barang elektronik, kepemilikan alat komunikasi, perilaku dalam pergi berlibur, dan perilaku mengkonsumsi rokok tidak terdapat perubahan saat sebelum dan sesudah rumah tangga menerima bantuan PKH.

Daftar Rujukan

- Ananda, F. R. 2015. *Analisis Pengaruh Sosial Ekonomi terhadap Pengeluaran Konsumsi Keluarga Miskin*.
- Cahyono, S. A. T. dan S. W. I. 2018. Gerak Langkah Program Keluarga Harapan : Kontribusi Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat The Action Step Of Expected Family Program : The Contribution of Expected Family Program to the Welfare Improvement of Beneficia.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan. 2012. Jumlah Keluarga, Keluarga Miskin, dan Presentasinya Tahun 2012.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan. 2016. Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2016.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2017. Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten di Jawa Timur Tahun 2017.
- Direktori Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. 2019. Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan 2019.
- Fitriani, D. dan T. S. 2014. Peran Pendamping Dan Ketua Kelompok Dalam Pemanfaatan Dana Pendidikan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Talok. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 03(02), 753–768.
- Haugton, J dan Shahidur R. K. 2012. Pedoman Tentang Kemiskinan dan Ketimpangan. Jakarta: Salemba Empat.

-
- Imawan, B. 2013. *Analisis Perbandingan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani dan Buruh Sandal di Desa Sukaharja Cijeruk - Bogor*.
- Khairunnisa, S. H. dan L. A. 2014. Determinan Angka Partisipasi Sekolah SMP di Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 15(1), 91. <https://doi.org/10.21002/jepi.v15i1.444>.
- Kuntjorowati, E. 2018. Pengaruh Pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan melalui. *Jurnak PKS*, 17, 89–100.
- Kustanto, M. 2019. Konstruksi Sosial Tentang Pendidikan Pada Keluarga Penerima Manfaat (Kpm) Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kabupaten Sidoarjo. *Sosio Konsepsia*, 8(3),267–281. <https://doi.org/10.33007/ska.v8i3.1675>.
- Kusuma, M. K. 2018. *Analisis Konsumsi Daging Sapi dan Daging Ayam pada Rumah Tangga Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)*.
- Menteri Sosial Republik Indonesia. (n.d.). 2018. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.
- Prastiwi, P. A. dan S. H. 2018. Gaya Hidup Konsumtif Penerima Bantuan Pkh (Studi Di Desa Rejosari Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung). *Paradigma*, 6(1), 1–8.
- Rahardja, P., Mandala, M. 2014. *Teori Ekonomi Mikro Edisi Kelima*. Penerbit: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Samoelson, Paul A., William, D. Nordhaus.1992. *Mikro Ekonomi Edisi Keempatbelas*. Jakarta: Erlangga.
- Simanjutak, M., Herien, P., dan M. D. (2010). Karakteristik Demografi, Sosial, dan Ekonomi Keluarga. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 3(2), 101–113.